



WALIKOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH

DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan batas minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan belanja modal
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kotamobagu tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Di Lingkup Pemerintah Kota Kotamobagu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4680);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 19 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Kotamobagu.

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu;
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah ;
5. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas / efisiensi dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

8

6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah diluar APBD yang berada dibawah pengurusan atau penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit-unit dalam lingkungannya.
7. Aset Tetap adalah bagian dari BMD berupa aset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
8. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya perbikan dan biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset, perolehan aset tetap tersebut direncanakan bukan untuk dijual atau dihibahkan.
9. Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset Aset Tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan atau menerima imbalan.
10. Rampasan adalah Aset Tetap yang dikuasai pemerintah yang berasal dari pihak ketiga sebagai barang sitaan yang telah diputuskan pengadilan.
11. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.
12. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur namun tidak termasuk pemeliharaan.
13. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
14. Renovasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas
15. Restorasi adalah perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
16. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan Aset Tetap yang menambah kuantitas dan atau volume dan nilai dari Aset Tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
17. Reklasifikasi adalah perubahan Aset Tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
18. Pencatatan di dalam pembukuan (Intra Komptabel) adalah penatausahaan barang milik daerah yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap kapitalisasi aset tetap dan disajikan dalam neraca yang dibuat oleh SKPD.
19. Pencatatan di luar pembukuan (Ekstra Komptabel) adalah penatausahaan barang milik daerah yang nilainya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan secara terpisah di luar neraca yang dibuat oleh SKPD.

8

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan maksud sebagai berikut :
- a. sebagai pedoman SKPD dan unit kerja dalam melakukan penentuan nilai pembukuan aset ; dan
 - b. sebagai dasar pembebanan belanja modal yang terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset dari hasil Rehabilitasi/ Renovasi/ Restorasi.
- (2) Peraturan Walikota ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut :
- a. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai BMD yang dikapitalisasi
 - b. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pencatatan nilai BMD

Pasal 3

- Setiap SKPD / Unit Kerja harus melakukan kapitalisasi terhadap belanja barang dan jasa yang berakibat :
- a. memperoleh aset tetap hingga siap pakai ;
 - b. meningkatkan kapasitas / efisiensi BMD ; dan/atau
 - c. memperpanjang umur teknis BMD.

Pasal 4

Pengeluaran pada SKPD / Unit Kerja yang dikapitalisasi terdiri atas :

- a. Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintah daerah serta tidak untuk dijual, meliputi :
 1. pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan ; dan
 2. pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
- b. Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki ; dan
 2. nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapasitas aset tetap.
- c. Pengeluaran yang digunakan untuk :
 1. pengadaan tanah;
 2. pembelian/pembangunan jalan/irigasi ; atau
 3. pembelian/pembuatan Aset Tetap lainnya.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a butir 1 dan 2 dirinci sebagai berikut :
- a. pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanj yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

- b. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan meliputi :
 - 1. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - 2. pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- c. pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
- d. pembangunan gedung dan bangunan meliputi :
 - 1. pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan / pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - 2. pembanguann gedung dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

(2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :

- a. Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- b. Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

(3) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c butir 1 sampai dengan 3 dirinci sebagai berikut :

- a. pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, pengurangan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

- b. pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- c. pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi :
 - 1. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - 2. pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- d. pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pembelian/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- e. Pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya meliputi:
 - 1. pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan / pembangunan / pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - 2. pembuatan/pembangunan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

BAB III

PENGELUARAN TIDAK DIKAPITALISASI

Pasal 6

Pengeluaran pada SKPD/Unit Kerja yang tidak dikapitalisasi terdiri atas :

- a. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.

- b. Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset.
- c. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

BAB IV

BATAS MINIMUM KAPITALISASI ASET TETAP

Pasal 7

- (1) Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000,00 dan
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan.
- (2) Batas Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk :
 - a. Pengadaan/pembelian tanah ;
 - b. Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan ; atau
 - c. Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa :
 - 1. Koleksi perpustakaan
 - 2. Peralatan ruangan sekolah
 - 3. Barang bercorak kesenian
 - 4. Hewan/ternak dan tumbuhan

BAB V

PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 8

- (1) BMD dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.
- (2) Pencatatan BMD meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
- (3) Barang persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan BMD yang akan diserahkan kepada pihak lain.
- (4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intra komptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstra komptabel).
- (5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel)

8

- (6) BMD yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, terhadap BMD yang sedang dilakukan Kapitalisasi berlaku ketentuan lama sampai selesainya proses Kapitalisasi BMD dimaksud

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1.	KABID PENGELOLAAN ASET	e
2.	SEKRETARIS DPKAD	TL
3.	KEPALA DPKAD	J
4.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI	J
5.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	J
6.	SEKRETARIS DAERAH	MK

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 2013

H WALIKOTA KOTAMOBAGU, 



Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU 

Drs. Hi. MUSTAFA LIMBALO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610119 198803 1 008

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2013 NOMOR

- (6) BMD yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, terhadap BMD yang sedang dilakukan Kapitalisasi berlaku ketentuan lama sampai selesainya proses Kapitalisasi BMD dimaksud

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 14 Agustus 2013

WALIKOTA KOTAMOBAGU,


Drs. Hi. DJELANTIK MOKODOMPIT, ME

Diundangkan di Kotamobagu
Pada Tanggal 14 Agustus 2013


SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

Drs. Hi. MUSTAFA LIMBALO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19610119 198803 1 008

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2013 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU

I. UMUM

Pengeluaran belanja barang dan jasa yang dimaksudkan untuk memperpanjang masa manfaat (rehabilitasi/renovasi/restorasi) atau akan memberikan nilai ekonomi di masa akan datang dalam bentuk kapasitas, produksi, atau peningkatan standar kinerja yang memenuhi batas minimum kapitalisasi aset tetap harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan atau dilakukan kapitalisasi.

Setelah perolehan awal sebuah aset tetap yang sudah dilakukan kapitalisasi yaitu penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut, maka selanjutnya dapat diketahui nilainya. Dari nilai aset ini kemudian dapat dilakukan penetapan dan pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan batas minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*) sebagai dasar pembebanan Belanja Modal.

Oleh karena itu perlu disusun Peraturan Gubernur tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah, sebagai pedoman bagi SKPD dan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam melakukan penentuan nilai pembukuan aset.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan “peningkatan kualitas aset” adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya: jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

- Yang dimaksud dengan “peningkatan kapasitas” adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya: sebuah generator listrik yang mempunyai *output* 200 kw dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 kw.
- Yang dimaksud dengan “peningkatan kuantitas” adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada. Misalnya: penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² menjadi 500 m².
- Yang dimaksud dengan “peningkatan umur” adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya: sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 (delapan) tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

huruf a

Pengeluaran belanja pemeliharaan, contohnya :

1. Pengecatan bangunan/kendaraan/mebelair (peralatan / perlengkapan kantor);
2. Penggantian suku cadang kendaraan seperti ban, accu, busi;
3. Servis peralatan dan mesin rutin seperti (mobil, motor, disel/genset dll)
4. Penambahan assesoris kendaraan selain AC, Power Steering, Audio dan Audio Visual; dan
5. Servis peralatan/perlengkapan kantor seperti (Komputer, Mesin tik, AC, TV, Dispencer, LCD, Sound Sistem, Tape Recorder dll).

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan, meliputi::

1. pengeluaran untuk membiayai proses produksi;
2. pembelian/pengadaan barang pakai habis seperti alat tulis kantor;
3. pengeluaran langganan daya dan jasa; dan
4. lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD dengan nilai tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.

Pasal 7

ayat (1)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Batasan minimum Kapitalisasi Aset Tetap pada klasifikasi Gedung dan Bangunan senilai Rp. 10.000.000,- tidak berlaku untuk pekerjaan pengecatan.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas